

GLOBALISASI INFORMASI DAN PERUBAHAN POLITIK DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA ORDE BARU

Ulber Silalahi

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP Universitas Parahyangan Bandung

Globalization of information and the changes of post new order political and government administration

Abstract

The globalization of information in the early 21st century has made the country, government, and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover, the globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and desentralisation encourage democratization in other countries, including Indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government information post-New Order Indonesia. The method used is descriptive, qualitative study of literature. The findings suggest that the globalization of information have changed the political administration post-New Order Indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization democratization elections (presidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legilslatif members) and governance based on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26.9, the district increased 76.8, the city government increased 60.3%. This increase will impact on the improvement of government management, public service management and welfare of citizens

Keywords: The globalization of information, democratization, decentralization, good governance

A. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena menarik memasuki abad 21 atau milenimum ketiga ialah globalisasi di semua sektor, tidak terkecuali di sektor publik atau pemerintahan. Globalisasi mengakibatkan negara, pemerintah, dan masyarakat dunia semakin terhubung (*interconnected*) satu sama lain dengan interaksi dan interkoneksi yang intens dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, informasi dan teknologi. Globalisasi membuat dunia memasuki apa yang disebut oleh Kenichi Ohmae sebagai "era dunia tanpa batas" yang membuat dunia menjadi satu pasar global untuk barang, jasa, modal dan teknologi. Fenomena globalisasi memberi kita gambaran tentang eksistensi dari dinamika perubahan yang cepat dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat dunia, Indonesia tidak terkecuali (Kristiadi. 1997).

Menurut Kotler, Jatusripitak, dan Maesincee (1998:112-133), perubahan-perubahan dalam kekuatan-kekuatan dan tren-tren global memberi kesempatan dan sekaligus ancaman bagi bangsa-bangsa. Sejauhmana tiap bangsa mengambil kesempatan dan cara untuk

mengatasi ancaman tersebut tergantung pada kemampuannya yang inheren. Unsur-unsur dari kemampuan-kemampuan suatu bangsa terdiri atas kebudayaan, sikap, dan nilai suatu bangsa; kohesi sosial suatu bangsa; organisasi industri suatu bangsa; anugerah faktor suatu bangsa; dan kepemimpinan pemerintah termasuk kemampuan memelihara, memperbaiki dan menginvestasi modal alami, modal fisik, modal manusia, dan modal sosial sebagai faktor kritis bagi kesehatan jangka panjang perekonomian bangsa-bangsa.

Globalisasi terjadi di berbagai sektor menyangkut globalisasi informasi. Globalisasi informasi merupakan proses penyebaran informasi secara mendunia melalui komunikasi. Jadi, globalisasi informasi dipacu oleh perkembangan teknologi komunikasi. Abad informasi yang sekarang sedang diciptakan akan didasarkan pada semua teknologi komunikasi dan jaringan yang saling berhubungan. Telekomunikasi adalah kekuatan penggerak yang secara serentak menciptakan ekonomi global yang besar sekali dan menjadikan bagian-bagiannya lebih kecil dan lebih kuat. Telekomunikasi akan memberikan prasarana

yang akan dibutuhkan oleh setiap industri dan setiap perusahaan untuk bersaing di dalam pasar bebas yang benar-benar kosmopolitan. Pada awal abad informasi dari abad kedua puluh satu semua kemampuan komunikasi yang mungkin saja kita butuhkan akan dapat diletakkan di atas meja kerja kita, di dalam mobil kita, atau di atas telapak tangan kita. Evolusi dalam teknologi komunikasi menciptakan revolusi dalam pembagian informasi. Karena itu di dalam jaringan ekonomi global abad 21, teknologi informasi akan mendorong perubahan sama pastinya seperti perubahan manufaktur mendorong perubahan di dalam era industri (Naisbit, 1994: 51-54).

Menurut Toffler sebuah bom informasi sedang meledak di tengah-tengah kita dengan pecahan-pecahan imajinasi yang secara drastis mengubah cara pemahaman serta berperilaku dalam kehidupan ini. Kehadiran informasi global yang memiliki daya rangsang tinggi terhadap pendidikan sedang melanda kita dan masuk secara tidak terkendali melalui film, tayangan televisi, baik dalam maupun luar negeri atau melalui video dan internet. Proses globalisasi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan perubahan tata nilai itu didukung oleh produk teknologi komunikasi dan informasi semenjak dasawarsa 1970-an kepada media komunikasi massa, baik media cetak (surat kabar, majalah), dan media elektronik (radio, film, televisi, telematika, komputer, internet). Di dalam pengertian itu, muncullah istilah-istilah banjir informasi, era informasi, masyarakat informasi, era komputerisasi, dan era satelit. Arus informasi meluas ke seluruh pelosok dunia. Jaringan komunikasi masyarakat di masing-masing negara mengalami pembesaran volume informasi serta kecepatan penyebarannya (Muis, 2001: 47). Sementara daya pengaruh informasi terhadap masyarakat tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi itu.

Globalisasi informasi dewasa ini melanda negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Proses globalisasi dimulai oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menghadirkan aneka ragam saluran atau media yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian meledak menjadi berita dramatis di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

menghasilkan proksimitas global (*global proximity*) yang menyatukan antara kedekatan geografis, kedekatan sosiologis, kedekatan kultural dan kedekatan psikologis di satu pihak dan khalayak (*audience*) di pihak lain pun merasa dekat dengan kejadian-kejadian yang jauh.

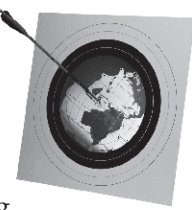
Tidak ada lagi bidang kehidupan yang luput dari pengaruh globalisasi, baik langsung dan tidak langsung (Kristiadi, 1997). Globalisasi informasi berdampak terhadap banyak segi kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan administrasi pemerintahan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Ini juga berarti bahwa globalisasi informasi telah mempengaruhi keinginan politik dari para elit politik dan elit pemerintah Indonesia pada akhir orde baru dan awal era reformasi dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat telah terjadi serta berhasil di negara-negara lain dan apa yang mereka anggap dibutuhkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan politik dan administrasi pemerintahan dari negara di mana mereka berada.

Bagaimana dampak dari globalisasi informasi terhadap demokratisasi dan desentralisasi politik dan administrasi pemerintahan, khususnya di Indonesia pasca orde baru akan dijelaskan dalam tulisan ini.

B. IMPLIKASI GLOBALISASI INFORMASI: MENUJU DEMOKRATISASI DAN DESENTRALISASI

Globalisasi telah menimbulkan kegoncangan dahsyat disemua bidang kehidupan baik di bidang hukum, lembaga peradilan, bidang ekonomi, sosial dan budaya, politik, kehidupan pers, pemerintahan, lembaga legislatif, keutuhan wilayah, di seluruh dunia terutama di negara-negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Naisbit mengakui, bahwa akhir tahun 1980-an, telekomunikasi global telah mendorong peristiwa dunia yang dramatis. *Trend* itu tidak hilang pada para pemimpin dunia. Pembagian informasi global memiliki kekuasaan untuk membentuk peristiwa-peristiwa dunia dengan mempengaruhi persepsi dan sikap (Naisbit, 1994: 103).

Ada dua hal penting yang terjadi sebagai dampak globalisasi informasi ialah dorongan demokratisasi dan desentralisasi di banyak negara, khususnya di dunia kedua dan dunia ketiga atau negara-negara berkembang dan sedang berlembang, baik dalam lingkup politik maupun administrasi dan pemerintahan.



Globalisasi bersifat lintas bangsa dan lintas budaya sehingga jurisdiksi dan sistem politik di masing-masing negara cenderung kabur. Media massa global secara otomatis seakan-akan menawarkan sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum global. Sebab itu di era dunia maya kini, kedaulatan itu nyaris merupakan masa silam bagi negara-negara, khususnya negara dunia ketiga.

Menurut Toffler (1987: 141, 146, 156), peranan informasi yang mengglobal atau melampaui batas negara menentukan prospek demokrasi. Apakah masa depan akan membawa lebih banyak atau lebih sedikit demokrasi?. Jawabannya belum tersurat, meskipun ada indikasi menuju kesana. Namun demikian itu bergantung, setidaknya untuk sebagian, pada tindakan kita sendiri. Tetapi untuk memahami prospek demokrasi, kita perlu memahami peranan informasi yang baru dalam kehidupan politik kita. Timbulnya suatu masyarakat baru dengan cepat, memfokuskan perhatian pada serangkaian isu politik yang berkaitan dengan informasi. Kebebasan dalam abad komputer, transmisi informasi lewat satelit yang melampaui batas negara, dan kebebasan informasi. Semua itu hanyalah sekelumit yang tampak dari masalah baru yang kita hadapi. Di baliknya terletak persoalan yang lebih mendasar, dengan implikasi jangka panjang untuk demokrasi. Karena itu masyarakat Gelombang Ketiga yang sedang muncul, akan lebih demokratis daripada orde industrial.

Demokratisasi yang terjadi pada akhir abad 20 dan memasuki abad 21 oleh Huntington disebut sebagai gelombang demokratisasi ketiga. Ini telah dimulai sejak tahun 1974-an. Perkembangan politik global yang penting – barangkali yang terpenting – pada akhir abad ke-20 ialah transisi yang dialami oleh sekitar 30 negeri dari sistem politik nondemokratis ke sistem politik demokratis (Huntington, 2001: xv). Sebuah gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis, yang terjadi di dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Sebuah gelombang biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis (Huntington, 2001: 22-27).

Dalam melahirkan transisi-transisi gelombang ketiga demokratisasi di negeri-negeri di mana transisi itu terjadi pada

waktunya, ada banyak perubahan yang tampaknya telah berperan penting dan salah satu di antaranya menurut Huntington (2001: 57) adalah “efek bola salju” atau efek demonstrasi (*demonstration effect*) atau sering disebut dengan istilah penularan (*contagion*), difusi, emulasi dari transisi-transisi awal menuju demokrasi pada gelombang ketiga, yang diperkuat sarana komunikasi internasional atau global, dalam merangsang dan menyediakan model bagi upaya mengubah rezim di negeri-negeri lain selanjutnya. Jadi, peristiwa yang terjadi di sebuah negara akan segera mempengaruhi perkembangan masyarakat di negara-negara lain (Muis, 2001: 47). Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian mendorong demokratisasi di negeri-negeri lain, baik karena negeri-negeri itu tampaknya menghadapi masalah-masalah yang sama, atau karena demokratisasi yang sukses di tempat lain mengesankan bahwa demokratisasi dapat menjadi obat bagi segala masalah yang mereka hadapi, atau karena negeri yang telah mengalami demokratisasi itu kuat dan/atau dipandang sebagai sebuah model politik dan budaya.

Menurut Huntington (2001: 122), dalam praktek ada tiga hal yang diperlihatkan oleh efek demonstrasi sebagai salah satu faktor penyebab demokratisasi gelombang ketiga. Pertama, efek demonstrasi memperlihatkan kepada para pemimpin dan kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat tentang kemampuan para pemimpin dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat lain dalam mengakhiri sistem otoriter dan memulai sistem demokratis. Efek demonstrasi memperlihatkan bahwa hal itu dapat dilakukan, dan karenanya barangkali akan merangsang pemimpin-pemimpin dan kelompok-kelompok dalam masyarakat kedua untuk meniru para pemimpin dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang pertama. Kedua, efek demonstrasi menunjukkan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Orang-orang pada masyarakat yang mengikuti jejak masyarakat pertama tadi belajar dari dan berupaya meniru teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan untuk mewujudkan demokratisasi pada waktu yang lebih dini. Kelompok-kelompok orang Korea secara sadar meniru pendekatan “*power people*” yang telah berhasil menumbangkan pemerintah diktator Marcos. Ketiga, para pejuang demokrasi yang tampil belakangan juga belajar tentang bahaya-bahaya yang harus dihindari dan kesulitan-

kesulitan yang harus diatasi.

Jadi, globalisasi informasi mempromosikan demokrasi (*globalization promote democracy*) atau globalisasi mendorong demokrasi (*Globalization drives democracy*) secara langsung. Ini juga dapat dimaknakan atau dipahami bahwa telah berlangsung globalisasi demokrasi (*globalization of democracy*)¹. Argumen yang dapat dikemukakan adalah bahwa inovasi teknologi dalam komunikasi yang menyertai globalisasi membantu mempercepat demokrasi di negara-negara lain, khusus negara-negara berkembang dan sedang berkembang yang belum demokratis. Inovasi teknologi komunikasi yang terjadi dalam dan menyertai globalisasi membawa keuntungan dalam komunikasi untuk memberdayakan warga untuk mendapatkan informasi lebih bebas, lebih cepat dan lebih berkualitas dan ini juga membantu mendidik masyarakat. Informasi yang lebih cepat, lebih banyak dan lebih berkualitas tentu akan meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya mempromosikan atau mendorong demokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi². Kemudian jika demokrasi identik dengan kebebasan dan apabila yang dimaksud ialah kebebasan dalam mendapatkan informasi dan mengakses teknologi informasi, maka benar apabila dikatakan bahwa globalisasi mendukung dan mempromosikan demokrasi.

Dengan informasi tersebut maka globalisasi juga membantu memberdayakan para profesional yang ada pada kelas menengah untuk tumbuh. Lipset mengatakan bahwa globalisasi mendorong terciptanya kelas menengah. Kelas menengah inilah yang memunculkan permintaan akan demokrasi politik yang lebih luas, tidak terbatas pada kelas atas³. Peningkatan kelompok warga dan profesional kelas menengah berarti juga peningkatan masyarakat sipil (*civil society*) yang mendukung proses demokratisasi. Fakta menunjukkan banyak petani pedesaan sekarang mengguguli kelas (kasta) sosial mereka dengan mengambil alih produksi secara langsung

dengan terlibat dalam memanfaatkan informasi dan teknologi. Misalnya petani di desa Kamalpur India telah memulai menjual panen mereka dengan menggunakan komputer. Dengan memanfaatkan komputer, petani dapat dengan bebas memantau harga pasar yang menguntungkan mereka dan menghindari bentuk-bentuk kecurangan pasar⁴.

Implikasi lain dari globalisasi informasi ialah meningkatkan desentralisasi pemerintahan dan privatisasi aktivitas-aktivitas di sektor publik atau pemerintahan. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi) dan kepada pelaku usaha (privatisasi). Melalui kebijakan desentralisasi membuat pemerintahan daerah menjadi otonom.

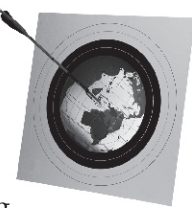
Perkembangan politik administrasi global yang berdampak pada politik administrasi lokal yang penting – barangkali yang terpenting – pada akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 ialah transisi yang dialami oleh lebih dari tiga perempat dari 75 negara berkembang dan negara dalam transisi dengan populasi melebihi lima miliar, dengan sistem politik dan administrasi secara sentralistik telah memulai berbagai kebijakan desentralisasi dengan mentransfer kekuasaan politik (*political power*) dan kekuasaan administratif (*administrative power*), termasuk kekuasaan ekonomi dan keuangan (*economy and financial power*) kepada pemerintah lokal (Hentic dan Bernier, 1999: 202).

Jadi ada kaitan antara globalisasi dan desentralisasi. Globalisasi mendorong perubahan pemerintahan dan administrasi dari sentralistik menjadi desentralisasi. Faktor-faktor global telah menggeser kekuasaan dan otoritas ke bawah dari pemerintahan nasional ke pemerintahan subnasional .

C. GLOBALISASI INFORMASI: MENUJU TERBENTUKNYA “1000 NEGARA”

Demokratisasi yang semakin besar atau mengglobal menurut Naisbit⁵ melahirkan semakin banyak jumlah negara di dunia

1. Marian Kempny *Globalization of Democracy and Conditions for Democratic Community in the Globalized World*. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2012 dari <http://www.rci.rutgers.edu/~culdems/m/Kempny%20Paper.htm>
2. *Jurnal Phobia*. 2011. *On Globalization and Democracy*. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2012 dari <http://frenndw.wordpress.com/2011/06/16/on-globalization-and-democracy/>
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. Menurut Naisbit (1994: 35), berdirinya sejumlah negara-negara baru cenderung terjadi di negara-negara dengan pemerintahan sentralistik seperti di Eropah daripada di negara-negara dengan pemerintahan desentralistik seperti di Amerika. Di Amerika Serikat belum terjadi pembentukan negara baru - kecuali negara bagian Californiadan Hawaii pada tahun 1993 telah ada keinginan untuk memecahnya menjadi beberapa negara bagian - karena negara tersebut meskipun negara federal, sangat terdesentralisasi, dengan orang-orang di negara bagian dan kota-kota besar serta kota kecil menjalankan banyak sekali pemerintahan sendiri.



terbentuk. Dengan tersebarnya demokrasi secara luar biasa di dunia, orang – suku – melihat sebuah peluang untuk pemerintahan sendiri. Tentu saja pemerintahan sendiri (termasuk kemandirian daerah otonom melalui kebijakan desentralisasi) merupakan pilar dari demokrasi. Orang di seluruh dunia mulai meraih peluang itu. Tribalisme yang terus meningkat ini harus dikaitkan dengan revolusi dalam telekomunikasi karena ini membuat segalanya transparan, yaitu, setiap orang dapat melihat apa yang tengah terjadi di mana saja. Kita semua dapat memonitor proses gerakan besar-besaran menuju pemerintahan sendiri, dan mengecek akses-akses – kalau kita mau. Itu justru terjadi ketika arti penting negara-bangsa menyusut, di mana ide bahwa pemerintahan pusat – satu mainframe yang besar – merupakan bagian penting dari pemerintahan sekarang sudah usang. Ini semua tidak lepas dari revolusi dalam telekomunikasi (Naisbit, 1994: 25, 31, 40).

Kita sekarang sedang bergerak ke arah sebuah dunia yang terdiri atas 1.000 negara, kata Naisbit karena, pertama, banyak orang dari tribalisme baru menginginkan pemerintahan sendiri dan setiap hari mereka melihat orang lain mendapatkan pemerintahan sendiri, atau bergerak ke arah itu. Kedua, negara-bangsa sudah mati. Bukan karena negara-bangsa ditundukkan oleh negara-super, melainkan karena mereka pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih efisien – sama seperti perusahaan-perusahaan besar. Dan ketiga, revolusi dalam telekomunikasi tidak hanya menginformasikan gerakan luar biasa ini menuju pemerintahan sendiri yang demokratis, tetapi juga memonitor dan membuat transparan karakter dan sifat dari prosesnya. Telekomunikasi modern juga memungkinkan dan mendorong kerja sama yang luar biasa di antara orang banyak, perusahaan, dan negara (Naisbit, 1994: 36).

Demokrasi menyapu dunia dan dunia belajar tentangnya melalui sistem telekomunikasi global. Era baru adalah era pemerintahan sendiri bagi orang-orang di seluruh dunia yang semuanya dihubungkan satu sama lain dengan jaringan PC (komputer pribadi). Beberapa dasawarsa dari sekarang akan lebih mudah untuk mengawasi 1.000 negara dan ribuan jaringan global daripada mengawasi 100 negara dua dasawarsa yang lalu, dan pada pertengahan abad yang akan datang, menurut Naisbit (1994: 35), kita pasti sudah dekat dengan jumlah itu; itulah arah yang kita tuju. Pemecahan negara

besar ke arah sejumlah negara-negara cenderung akan terjadi seperti dalam perusahaan-perusahaan di era global. Naibit mengakui terjadi paradok, dimana ketika ekonomi global menjadi lebih besar, bagian-bagian komponennya menjadi lebih kecil; dan semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan sedang akan mendominasi dan di mana unit-unit perusahaan dibuat lebih kecil dan semakin kecil agar dapat mengglobalisasikan ekonomi secara lebih efisien.

Naisbit mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar bekerja paling baik, setelah kita memiliki telekomunikasi sekarang, jika dibagi menjadi unit-unit kecil yang otonom. Negara-negara juga akan bekerja paling baik dengan cara itu. Sekarang setelah kita menjadi satu dunia – semakin kecil potongannya, semakin baik kerjanya. Komputer memungkinkan kita mengorganisasi dan mengawasi kekompleksan karena memiliki banyak unit kecil – bagi perusahaan dan bagi dunia. Pemecahan negara (yang disatukan secara artifisial) menjadi entitas nasional atau kesukuan pasti akan menguntungkan seperti halnya pemecahan perusahaan. Tindakan ini menghilangkan duplikasi dan pemborosan, mengurangi birokrasi dan mendorong motivasi dan tanggung gugat (*accountability*), dan menghasilkan pemerintahan sendiri (subsidiaritas) pada tingkat yang paling dasar – sama seperti di perusahaan-perusahaan” (Naisbit, 1994: 32-33).

Terjadinya efek demonstrasi dalam gelombang demokratisasi ketiga antara lain disebabkan ekspansi komunikasi dan transportasi global yang luar biasa yang terjadi dalam beberapa dasawarsa setelah Perang Dunia II dan terutama tercakupnya seluruh dunia oleh satelit-satelit televisi dan komunikasi pada tahun 1970-an. Karena dunia telah menjadi satu oleh perkembangan teknologi dan globalisasi informasi dan komunikasi, maka apa yang terjadi di luar akan cenderung diadopsi di Indonesia kini dan masa depan. Elit politik dan kelas menengah dan masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri dengan kehidupan makmur dan demokratis dan yang menghargai HAM di negara-negara asing yang mereka ketahui melalui media komunikasi global dan globalisasi informasi. Mereka menginginkan agar lingkungan sosial dan politik negara mereka juga memberikan peluang dan kebebasan kepada mereka untuk hidup, seperti

halnya di negara-negara maju yang mereka lihat di layar TV. Bahkan di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, aspirasi buruh dapat bercorak atau berorientasi kebebasan untuk melakukan pemogokan atau demonstrasi. Itulah pengaruh berita-berita tentang kaum buruh di negara-negara asing, yang sudah demokratis dan yang lebih makmur dan bebas mengajukan bermacam-macam tuntutan, mulai dari upah hingga calon-calon kepala daerah, presiden dan menteri yang dianggap memahami kebutuhan buruh. Singkatnya, globalisasi menguntungkan bangsa Indonesia dalam kehidupan sosial dan politiknya karena globalisasi informasi menawarkan keterbukaan, demokrasi, keadilan, penghormatan terhadap HAM, masyarakat sipil, hak-hak sipil, dan penegakan hukum (Muis, 2001: 63). Dan ternyata globalisasi media massa ataupun informasi banyak menggugah keprihatinan di negara-negara yang kurang maju. Sebagian besar berkat dampak komunikasi global itulah, menjelang dasawarsa 1980 tak syak lagi bahwa citra tentang "revolusi demokratis di seluruh dunia" telah menjadi suatu realita dalam benak para pemimpin politik dan intelektual di sebagian besar negeri di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Karena orang mempercayai hal itu sebagai sesuatu yang riil, maka akibatnya adalah riil (Huntington, 2001: 123).

Meskipun komunikasi yang semakin intensif menyebabkan peristiwa-peristiwa di tempat yang jauh tampak relevan, efek demonstrasi yang paling kuat masih berada di negeri-negeri yang secara geografis berdekatan dan memiliki budaya yang sama. Tumbangnya Markos pada Februari 1986 merangsang timbulnya kecemasan di kalangan pemimpin otoriter dan harapan di kalangan demokrat oposisi di negeri-negeri lain di Asia, termasuk Indonesia. Dampaknya yang paling kuat ada di Korea Selatan dan juga Indonesia. Di Korea Selatan, misalnya, sebulan sesudah Kardinal Sin memainkan peran besar dalam perubahan rezim di Filipina, Kardinal Kim untuk pertama kalinya menyerukan diadakannya perubahan konstitusional dan dibentuknya demokrasi di Korea. Dan akhirnya Korea berhasil membangun demokratisasi di bawah rezim Kim Dae Jung.

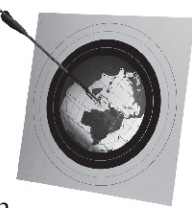
Kejadian-kejadian di Filipina dan Korea tampaknya, meskipun tak banyak bukti tersedia, telah membantu merangsang demonstrasi-demonstrasi prodemokrasi di Birma (kini, Myanmar) pada musim panas 1988 dan Cina pada musim gugur 1986 dan musim semi 1989,

serta memiliki suatu dampak terhadap liberalisasi di Taiwan. Di Cina, misalnya, pada Juni 1989, dunia diguncang oleh peristiwa Tiananmen. Para mahasiswa, para pemuda, dan kaum intelektual melakukan demonstrasi berdarah prodemokrasi. Dalam tragedi pembantaian politik tersebut sejarah menyaksikan betapa kuatnya arus budaya politik terbuka (demokrasi) melanda negara komunis tersebut. Para penguasa RRC meyakini peristiwa berdarah tersebut sebagai pengaruh Barat oleh globalisasi informasi. Di Indonesia juga dirangsang oleh semangat prodemokratisasi melakukan demonstrasi-demonstrasi dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan di Filipina untuk menumbangkan rezim orde baru atau rezim Soeharto pada tahun 1998. Spirit "people power" sangat kental dan dominan digunakan sebagai spirit dalam demonstrasi untuk menumbangkan rezim Soeharto seperti tampak dalam berbagai tulisan spanduk yang dibawa oleh para demonstran.

D. GLOBALISASI INFORMASI DAN POLITIK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA ORDE BARU: MENUJU TERBENTUKNYA "1000 DAERAH"

Globalisasi informasi menyebabkan terbentuknya satu sistem dunia (*the world system*) sehingga negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia, adalah sebuah subsistem dari sistem dunia. Sifat interdependensi di antara subsistem (negara-negara) itu tidak memungkinkan Indonesia melepaskan diri dari sistem global tersebut terutama bagian dari sistem global yang lebih kuat dan dominan. Nation-state dan kedaulatan negara juga menjadi tergantung pada sistem kekuasaan global. Seperti juga nasib negara-negara lain, Indonesia di *cyberworld era* atau globalitas praktis sudah kehilangan batas-batas kekuasaan (*borderless state*) (Muis, 2001: 21).

Sebagai dampak dari gelombang globalisasi informasi, maka gelombang demokratisasi di Indonesia dimulai dengan usaha untuk menjatuhkan rejim orde baru yang otoriteristik dan sentralistik melalui demonstrasi prodemokrasi pada tahun 1997-an. Demonstrasi ini berhasil menumbangkan rejim Soeharto atau penguasa orde baru dan lahirlah rejim baru yang disebut rejim reformasi yang membawa angin prodemokratisasi dan prodesentralisasi dalam



politik administrasi dan pemerintahan Indonesia. Ini menunjukkan indikasi apa yang disebut oleh Huntington (2001: 43), bahwa sejumlah negeri otoriter telah berubah menjadi demokratis dalam suatu kurun waktu tertentu, fokusnya terletak pada perubahan rejim, dan bukan pada eksistensi rejim.

Globalisasi informasi dan komunikasi secara pesat berdampak pesat terhadap kehidupan politik administrasi dan pemerintahan Indonesia kini dan masa depan. Globalisasi informasi telah menimbulkan daya dorong yang kuat untuk membawa Indonesia mengubah politik administrasi dan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menjadi demokratis dan desentralistik. Informasi-informasi demokratisasi dan desentralisasi global yang diterima oleh para elit politik dan masyarakat Indonesia mengubah perilaku mereka untuk menerapkan hal yang sama di Indonesia.

Globalisasi informasi, bagaimanapun, mengakibatkan penerapan demokratisasi dan desentralisasi bukan lagi sekedar bagaimana menurut persepsi dan keinginan elit politik dan masyarakat lokal, melainkan telah berkembang menjadi menurut persepsi global. Artinya, praktek pelaksanaan demokratisasi politik dan desentralisasi pemerintahan di Indonesia tidak lagi sekedar hanya menurut kemauan politik para elit politik, pemerintahan dan administrator publik, melainkan berdasarkan persepsi-persepsi kebutuhan-kebutuhan global, termasuk tuntutan-tuntutan negara-negara dan institusi institusi internasional donor dan para investor asing. Seperti diketahui bahwa dalam globalisasi informasi tidak dapat dihindarkan meningkatnya peran organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga internasional sekaligus meningkatnya ketergantungan antarbangsa, antar negara, antar pemerintah dan antar pemerintah dengan nonpemerintah.

Tumbangnya rezim orde baru yang otoriter dan sentralistik dan lahirnya orde reformasi yang menyuarakan demokratisasi dan desentralisasi merupakan dampak dari globalisasi informasi, khususnya globalisasi informasi berkenaan dengan praktek-praktek politik dan pemerintahan di banyak negara. Terjadilah dua kecenderungan perubahan politik dan administrasi pemerintahan di Indonesia dengan mengadopsi desentralisasi dan demokratisasi.

Ini merupakan perubahan-perubahan ke arah apa yang telah dimiliki dan diterapkan oleh berbagai negara di dunia pertama dan kedua serta di negara-negara Asia yang jauh lebih maju dan lebih baik dari Indonesia era orde baru. Yang secara nyata telah meningkatkan kehidupan politik dan pemerintahan mereka menjadi lebih baik.

Perubahan pertama ialah desentralisasi dan otonomi daerah yang sungguh-sungguh, bukan hanya secara politis, melainkan secara administratif dan ekonomi. Untuk itu pemerintah mengeluarkan dua kebijakan penting yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (kemudian diganti menjadi UU No. 32/2004) dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah UU Otonomi Daerah tersebut diberlakukan terjadi perubahan mencolok. Jika Naisbit mengatakan, kita sekarang sedang bergerak ke arah sebuah dunia yang terdiri atas 1.000 negara, maka Indonesia sekarang sedang bergerak ke arah sebuah negara yang terdiri atas 1.000 daerah. Elit lokal di banyak daerah menginginkan daerah otonom baik dalam bentuk propinsi, kabupaten maupun desa karena dengan menjadi daerah otonom maka daerah dan masyarakatnya menjadi lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan pelayanan publik lebih baik.

Sejak reformasi dimulai tahun 1999, politik administrasi pemerintahan atau politik wilayah di Indonesia langsung bergerak ke arah divisionalisasi teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten dan Kota. Setelah reformasi berjalan 12 tahun, politik administrasi pemerintahan telah mengubah wajah daerah NKRI menuju "wajah 1000 daerah"⁶. Dalam era reformasi telah terjadi pertumbuhan daerah otonom secara signifikan dari 309 menjadi 524 daerah provinsi/kabupaten dan kota atau meningkat sebanyak 69,6%.

Rinciannya adalah Pemerintah Provinsi mekar dari 26 menjadi 33 daerah provinsi atau meningkat 26,9%. Satu berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota yaitu Jakarta dan empat berstatus sebagai Daerah Istimewa/Otonomi Khusus yaitu Aceh, Yogyakarta, Papua, Papua Barat. Dari ke-33 provinsi tersebut, 10 di antaranya terletak di Pulau Sumatera, 6 di Pulau

6. Di samping mengubah wajah daerah Indonesia, ada kecenderungan semakin kuat indikasi beberapa daerah untuk "berpisah" dengan NKRI. Beberapa daerah seperti Irian Jaya atau Papua oleh Gerkan Papua Merdeka, Aceh atau Nanggroe Aceh Darussalam oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Maluku oleh Republik Maluku Selatan (RMS), dan juga daerah-daerah di Sumatera atau Kalimantan ingin berpemerintahan sendiri- seperti "Daerah Timor Timur" yang telah menjadi negara Timor Lorosae dan juga beberapa negara di eropa yang telah menjadi negara kecil dan mandiri dan menjadi lebih makmur.

Tabel 1: Pertumbuhan Daerah Otonom NKRI: Era Orde Baru dan Era Reformasi

Pemerintah Daerah	Akhir Orde Baru (1999)	Orde Reformasi (2011)	Peningkatan Daerah Otonom	
			Frekuensi	%
Provinsi	26	33	7	26,9
Kabupaten	225	398	173	76,8
Kota	58	93	35	60,3
Total	309	524	215	69,6

Jawa, 4 di Pulau Kalimantan, 6 di Pulau Sulawesi, 3 di Kepulauan Nusa Tenggara, 2 di Kepulauan Maluku, dan 2 lainnya terletak di Pulau Papua. Kabupaten tumbuh dari 225 menjadi 398 Pemerintah Kabupaten atau meningkat 76,8%. Kota tumbuh dari 35 menjadi 93 Pemerintah Kota atau meningkat 60,3% (lihat Tabel 1). Di samping itu juga terjadi pemekaran Kecamatan menjadi 5.263, Kelurahan menjadi 7.113 dan Desa menjadi 62.806⁷. Itu belum termasuk daerah yang sedang dalam proses usulan untuk menjadi daerah otonom, juga Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang juga sedang diproses pemekaran.

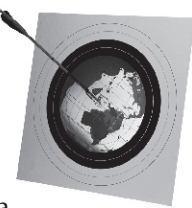
Jadi, telah menjadi kenyataan di Indonesia apa yang dikatakan oleh Naisbit (1994: 14) bahwa dalam abad 21 banyak pemerintah membuat unit-unit kecil daerah lebih otonom agar mereka dapat mengglobalisasikan ekonominya secara lebih efisien. Pemerintah Indonesia telah memekarkan wilayah pemerintah menjadi banyak daerah yang lebih otonom, meskipun belum “dapat mengglobalisasikan ekonominya secara lebih efisien”.

Perubahan kedua ialah demokratisasi politik. Ini berkenaan dengan demokratisasi pemilihan umum (pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif) dan pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil, bupati dan wakil, walikota dan wakil) dan juga pemilihan legislatif daerah) yang dilakukan menjadi secara langsung. Perubahan sistem sistem kepartaian, sistem perwakilan, serta dibentuknya amahkamah konstitusi dan komisi judicial juga mengindikasikan proses demokratisasi. Demokratisasi juga tampak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mulai mengacu pada *good governance system*. Penyelenggaraan *good governance* sebagaimana dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara di dunia

terutama di eropah dan amerika sejalan dengan prinsip demokrasi dalam perspektif global. *Good governance* (sering diterjemahkan menjadi pemerintahan yang baik atau tata pemerintahan yang baik) yang dilansir oleh World Bank dan UNDP adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang solid dan bertanggung-jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, juga dalam rangka mewujudkan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 24).

Terkait dengan penerapan *good governance*, akan terjadi perubahan secara mendasar tentang praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik struktural, fungsional, maupun nilai-nilai. Perubahan struktural menyangkut perubahan aktor dalam *governance*. Satu negara yang menerapkan *good governance* melibatkan tiga aktor utama yaitu pemerintah (*government*), dunia swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Akan terjadi perubahan hubungan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. *Good governance* memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien karena terjadi sinergi konstruktif di antara tiga aktor dalam wujud kemitraan (*partnership*). Membangun kemitraan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat yang menjadi komponen pelaku dalam pemerintahan yang baik perlu untuk menciptakan suatu sinergi sehingga tercipta suatu kesejahteraan dalam masyarakat. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik, hukum dan administratif yang kondusif, sektor swasta atau institusi bisnis mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan

7. Diolah dari http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah_wilayah_administratif_di_Indonesia; http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia; http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia. Data tentang kabupaten kota tidak termasuk satu kabupaten administrasi dan lima kota administrasi.



pendapatan masyarakat, dan masyarakat sendiri mewadahi interaksi sosial politik dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Perubahan fungsional menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Ini penting karena memang ada fungsi-fungsi atau bidang-bidang kegiatan yang efektif dilakukan oleh pemerintah, sementara bidang lain lebih efektif jika dilakukan oleh dunia usaha atau masyarakat (Osborne dan Gaebler, 1996: 379-385). Oleh karena itu pemikiran ke arah privatisasi tugas dan fungsi pemerintah tertentu, seperti tugas dan fungsi pelayanan publik, menjadi suatu alternatif karena "*privatization adalah the key to better government*" (E.S. Savas. 1987).

Perubahan pada tata nilai dalam berpemerintahan untuk memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien melalui hubungan sinergi konstruktif di antara tiga pilar tersebut dengan fungsi dan peran yang jelas, dan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersifat saling terkait dan saling memperkuat. Dalam hal yang terakhir, globalisasi informasi telah mendorong agar tiap pemerintah mengutamakan atau menekankan nilai-nilai *participation* (partisipasi), *rule of law* (penegakan hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (kepekatangapan), *consensus orientation* (orientasi konsensus), *equity* (keadilan), *efficiency and effectiveness* (efisiensi dan keefektifan), *accountability* (akuntabilitas), *strategic vision* (visi strategis) (UNDP. 1997). Jika ternyata aktor-aktor politik dan pemerintah tidak berdasarkan pada nilai-nilai tersebut akan segera mendapat kritikan dan tekanan baik dari masyarakat maupun negara-negara dan lembaga-lembaga publik internasional di mana pemerintah Indonesia memiliki ketergantungan dengan mereka dan mereka memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia.

E. SIMPULAN

Globalisasi informasi yang disertai dengan media komunikasi yang semakin membaik telah menyebabkan arus informasi tentang politik, administrasi dan pemerintahan lintas negara dan lintas daerah dapat diperoleh dengan cepat, lebih luas dan lebih akurat karena kedekatan pesan-pesannya dengan pihak penerima di seluruh dunia juga kian tinggi. Telah terjadi

semacam *global proximity* di tingkat dunia maupun di tingkat nasional, termasuk Indonesia, dimana setiap tindakan politik dan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh elit politik dan aktor administratif di pusat dan di daerah, baik positif maupun negatif, akan segera dapat diketahui oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu dinamika politik administrasi pemerintahan yang terjadi di banyak negara maju telah menjadi inspirasi dan pendorong bagi elit dan aktor politik dan pemerintahan dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengubah politik dan administrasi pemerintahan dari nondemokratis menjadi lebih demokratis dan dari sentralistik menjadi lebih desentralistik.

Globalisasi informasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memperbaiki kehidupan berpolitik, berpemerintahan dan beradministrasi. Globalisasi informasi telah membuat semakin banyak negara menerapkan demokratisasi dan desentralisasi, semakin banyak negara di dunia terbentuk, semakin banyak daerah terbentuk. Di Indonesia, implementasi desentralisasi mengubah politik administrasi pemerintahan atau politik wilayah menuju "seribu daerah otonom". Sebab telah lahir daerah-daerah otonom dari 309 daerah otonom pada era orde baru menjadi 524 daerah otonom dalam duabelas tahun era reformasi.

Kemudian implementasi demokratisasi telah membuat Indonesia menjadi "lebih demokratis" dalam pemilihan umum (pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif pusat) dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota legislatif daerah). Baik pemilihan presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan walikota/wakil walikota serta pemilihan anggota legislatif pusat (DPR) dan anggota legislatif daerah (DPRD) telah dilakukan secara langsung. Demokratisasi juga tampak dalam usaha pemerintah untuk mempraktekkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan *good governance system*.

KEPUSTAKAAN

Hentic, Issabelle and Gilles Bernier, *Rationalization, decentralization, and participation in the public sector management of developing countries*, dalam *International Review of Administrative Science*, Volume 65 Number 2 June 1999.

- Huntington, Samuel P. 2001. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, penerjemah Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kotler, Philip, dan Somkid Jatusripitak, Suvit Maesincee. 1998. *Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nations)*. Alih Bahasa oleh Aldi Jenie. Jakarta: PT. Prenhallindo, 112-133.
- Kristiadi, J. B. 1977, *The Perspective of public administration in facing the challenges of 21st century*. Inaugural speech associate professor in administration science at the Faculty of Social and Political Sciences Padjadjaran University, 6 October 1997, Department of Education and Culture Padjajaran University, Bandung.
- Muis, A. 2001. *Indonesia di Era Dunia Maya: Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naisbit, John. 1994. *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public sector*. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Savas, E.S. 1987. *Privatization The Key to Better Government*. New Jersey: Chatam House Publishers, Inc.
- Toffler, Alvin. 1987. *Kejutan dan Gelombang*. Jakarta: Pantja Simpati.
- Marian Kempny. *Globalization of Democracy and Conditions for Democratic Community in the Glocalised World*. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2012 dari <http://www.rci.rutgers.edu/~culdemsm/Kempny%20Paper.htm>
- Jurnal Phobia. 2011. *On Globalization and Democracy*. Diunduh pada tanggal 19 Juni 2012 dari <http://frenndw.wordpress.com/2011/06/16/on-globalization-and-democracy/>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Jumlah_wilayah_administratif_di_Indonesia
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia